

## KETIMPANGAN EKONOMI DI ZONA PERKOTAAN DAN PEDESAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Lefiadhi Premana  
[lefiadhi@gmail.com](mailto:lefiadhi@gmail.com)

Djaka Marwasta  
[jakamar@ugm.ac.id](mailto:jakamar@ugm.ac.id)

### *Abstract*

*This study aims to characterize the economic imbalances and conditions of community housing in the province of Yogyakarta Special Region. Data used for this research is national socioeconomic survey data of 2016 for household unit. Data is divided by district / city and classified by urban village. Inequality analysis is done by calculating gini index while the comparison of occupancy condition is done descriptively. The data used for the calculation of index index is the data of household expenditure. The calculations show that inequality for non-food expenditure is higher than food expenditure. The highest inequality of household expenditure is found in the area of Yogyakarta City (0.609) whereas the lowest inequality is rural Sleman Regency (0.273). Inequality for urban areas tends to be higher than in rural areas. Residential conditions are more varied in urban areas, but the condition of occupancy with bad conditions there are still many diareal rural. Poor settlement conditions exist in rural areas, but with a low percentage.*

**Keyword:** *Economic inequality, Expenditure, Housing quality, Gini index, Comparison of urban villages, Province of Special Region of Yogyakarta*

### *Abstrak*

Penelitian ini bertujuan mengkarakteristikan ketimpangan ekonomi dan kondisi hunian masyarakat di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data survei sosial ekonomi nasional tahun 2016 untuk satuan rumah tangga. Data dibagi berdasarkan kabupaten/kota dan diklasifikasikan menurut desa kota. Analisis ketimpangan dilakukan dengan perhitungan gini index sementara perbandingan kondisi hunian dilakukan secara deskriptif. Data yang digunakan untuk perhitungan gini index adalah data pengeluaran rumah tangga. Hasil perhitungan menunjukkan ketimpangan untuk pengeluaran non-pangan lebih tinggi dibanding pengeluaran pangan. Ketimpangan pengeluaran rumah tangga paling tinggi terdapat di wilayah Kota Yogyakarta (0,609) sedangkan ketimpangan yang paling rendah adalah pedesaan Kabupaten Sleman (0,273). Ketimpangan untuk wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding wilayah pedesaan. Kondisi hunian lebih bervariasi di wilayah perkotaan, namun kondisi hunian dengan kondisi buruk masih banyak terdapat di areal pedesaan. Kondisi permukiman yang buruk terdapat di wilayah pedesaan, namun dengan presentase yang rendah.

**Kata Kunci:** Ketimpangan ekonomi, Pengeluaran, Kualitas hunian, *Gini index*, Perbandingan desa kota, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

## PENDAHULUAN

Perkotaan terus berkembang dan menciptakan kondisi yang buruk bagi permukiman didalamnya. Tekanan penduduk dan kemajuan teknologi telah mendorong perkembangan kota serta menyebabkan terjadinya *urban sprawl*. *Urban sprawl* merupakan proses perembetan ciri fisik kekotaan ke arah luar (Giyarsih, 2010). *Urban sprawl* terjadi akibat padatnya lahan perkotaan serta perkembangan transportasi. Lahan di areal perkotaan tidak mampu lagi menampung penduduk yang meningkat. Kebutuhan akan lahan permukiman menjadi salah satu permasalahan yang memicu proses *urban sprawl*.

Permukiman menerima dampak akibat transformasi ciri fisik kekotaan. Perubahan penggunaan lahan terutama di daerah sub-urban telah terjadi dalam dekade terakhir di Kota Yogyakarta. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi mengakibatkan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kondisi permukimannya. Daerah pedesaan dengan karakteristik penduduk yang bekerja di bidang pertanian telah terdorong untuk mengalami transformasi ekonomi. Masuknya pendatang seiring dengan peningkatan sarana transportasi dan fasilitas umum turut mendorong perkembangan daerah pedesaan menjadi daerah sub-urban. Perkembangan ini mendorong terjadinya ketimpangan ekonomi.

Ketimpangan tidak selalu merepresentasikan kondisi yang buruk. Ketimpangan dapat menjadi imbalan dari kerja keras dan inovasi seseorang. Ketimpangan dapat diterima apabila kekayaan diperoleh dengan adil dan setiap orang memulai dengan awalan yang setara. Awalan yang setara adalah dimana semua orang dapat mengakses layanan publik dan memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan (World Bank, 2016).

Contoh dari fenomena segregasi adalah tumbuhnya permukiman megah (*real estat*) di daerah sub-urban Kota Yogyakarta. Permukiman *real estat* memiliki kecenderungan untuk tumbuh di sekitar ringroad Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena aksesnya yang mudah dan masih dinilai nyaman (Lenyanti, 2004). Permukiman jenis ini biasanya cenderung tertutup terhadap

warga lokal. Adanya pos penjagaan dengan palang pintu menyebabkan adanya jarak dalam masyarakat. kondisi ini sulit diterima masyarakat lokal dan menimbulkan ketimpangan sosial dalam masyarakat (Yunus, 2008).

Penelitian ini bertujuan membandingkan ketimpangan pada wilayah desa kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketimpangan diukur berdasarkan kemampuan ekonomi dan kualitas hunian. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi acuan perbandingan ketimpangan ekonomi dan kualitas hunian masyarakat pada wilayah desa kota tiap kabupaten/kota.

## METODE PENELITIAN

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah tingkat ketimpangan ekonomi masyarakat dan kualitas hunian. Unit analisis yang digunakan adalah wilayah perkotaan dan pedesaan pada tiap kabupaten/kota di DIY. Atribut yang digunakan untuk mendefinisikan tingkat ketimpangan adalah pengeluaran bulanan rumah tangga yang dibedakan untuk pengeluaran kebutuhan pangan dan non-pangan. Tingkat kualitas hunian masyarakat dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan variabel-variabel terkait seperti luas bangunan, bahan bangunan serta ketersediaan fasilitas penunjang permukiman. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui tingkat kualitas hunian pada tiap satuan wilayah penelitian.

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017 kor rumah tangga untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penggunaan data SUSENAS diharapkan dapat memberikan representasi yang lebih merata pada tiap satuan wilayah.

Data dianalisis dengan bantuan Software SPSS. Analisis dilakukan dengan menghitung tingkat ketimpangan ekonomi rumah tangga menggunakan Indeks gini. Analisis karakteristik hunian akan dilakukan menggunakan metode deskriptif-eksplanasi dengan membandingkan kualitas hunian pada tiap satuan wilayah penelitian. Analisis hubungan gini index dan kualitas hunian akan

dilakukan dengan mempertimbangkan PDRB daerah dan jumlah penduduk menurut pekerjaan utama pada wilayah tersebut. Diharapkan data tersebut dapat memberikan gambaran kondisi ketimpangan ekonomi masyarakat di wilayah perkotaan dan pedesaan di tiap kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rumus perhitungan yang digunakan untuk menghitung indeks gini adalah (LFME UNPAD & BAPPEDA Kota Bandung, 2015)

$$G = 1 - \sum_{i=1}^n (x_i - (x_i - 1))(y_i + (y_i + 1))$$

Keterangan:

G: Indeks Gini

$X_i$ : Presentase jumlah penduduk kumulatif ke- $i$

$Y_i$ : Presentase jumlah pengeluaran kumulatif ke- $i$

Analisis kualitas hunian dinilai berdasarkan indikator ditentukan oleh Badan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016. Hunian dikategorikan tidak layak apabila:

1. Luas lantai perkapita < 4m<sup>2</sup> (perkotaan) dan < 10 m<sup>2</sup> (perdesaan).
2. Jenis atap rumah terbuat dari daun atau lainnya
3. Jenis dinding rumah terbuat dari bambu atau lainnya
4. Jenis lantai tanah
5. Tidak memiliki fasilitas buang air besar (WC) sendiri
6. Sumber penerangan bukan listrik
7. Jarak sumber air utama ketempat pembuangan kotoran/tinja kurang dari 10 meter

Kualitas hunian dinilai berdasarkan skor pada masing-masing variabel yang dapat dilihat pada tabel 2.2. pembobotan dilakukan dengan mengacu pada penelitian terdahulu. Skor yang digunakan berkisar dari empat sampai satu. Nilai yang makin besar menandakan kualitas yang lebih baik (Damawati, 2011). Modifikasi dilakukan untuk menyesuaikan kriteria yang berbeda

pada tiap indikator. Indikator luas lantai disesuaikan dengan standar Badan Pusat Statistik dengan mengasumsikan satu keluarga berjumlah empat orang. Standar luasan rumah perkapita untuk wilayah perkotaan adalah 4m<sup>2</sup> sedangkan untuk wilayah pedesaan 10m<sup>2</sup> (BPS, 2016)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ketimpangan Pengeluaran

Hasil perhitungan indeks gini berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional periode Maret 2016 menunjukkan ketimpangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ada pada tingkatan sedang. Rata-rata hasil perhitungan indeks gini (pengeluaran total) untuk tiap wilayah kajian adalah 0,46. Jumlah ini lebih besar dibanding hasil publikasi BPS yang menunjukkan ketimpangan pengeluaran di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,420 pada Maret 2016 (BPS, 2017). Jumlah ini masih mengalami kenaikan pada Maret 2017 menjadi 0,432.

Perhitungan ketimpangan dibagi berdasarkan pengeluaran pangan dan non-pangan. Pengeluaran pangan menggambarkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok berupa bahan makanan dan olahannya. Hal ini menjadi penting untuk memastikan kecukupan gizi masyarakat. ketimpangan pengeluaran untuk kebutuhan pangan masih tergolong rendah karena berada di bawah 0,4. Kondisi ini memperlihatkan sebagian besar masyarakat mampu menjangkau kebutuhan pangan pokok. Perbandingan ketimpangan pengeluaran untuk kebutuhan pangan cenderung lebih tinggi di wilayah perkotaan.

Tabel 1 Perbandingan Gini Index Berdasarkan Desa Kota pada Tiap Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016

Kabupaten	Klasifikasi Wilayah	gini index			
		Pengeluaran untuk Pangan	Pengeluaran untuk Non Pangan	Pengeluaran Total	Pengeluaran Perkapita
<b>Kulon Progo</b>	Kota	0,325535637	0,467547408	0,398035323	0,326326246
	Desa	0,332637746	0,797713052	0,569271994	0,463976099
<b>Bantul</b>	Kota	0,372617901	0,671700041	0,529402325	0,646349648
	Desa	0,301642517	0,511628954	0,347747261	0,744786115
<b>Gunungkidul</b>	Kota	0,377681314	0,726218288	0,521693388	0,588256995
	Desa	0,327287	0,546816522	0,377159838	0,353752787
<b>Sleman</b>	Kota	0,349438275	0,686743017	0,557110447	0,426165307
	Desa	0,250327427	0,341349179	0,273380395	0,251028198
<b>Kota Yogyakarta</b>	Kota	0,483335486	0,375483695	0,609367102	0,403073901

*Sumber: data Olahan Survei sosial ekonomi nasional kor rumah tangga periode Maret 2016*

Ketimpangan pengeluaran pangan paling tinggi terdapat di wilayah Kota Yogyakarta dengan nilai gini 0,48. Hal ini disebabkan kecenderungan perilaku masyarakat perkotaan yang cenderung membeli bahan makanan di *supermarket* dengan biaya yang cenderung lebih mahal. Keberadaan restoran di areal perkotaan juga mendorong sikap konsumtif. Masyarakat jadi lebih memilih untuk membeli makanan jadi dibanding memasak di rumah. Padatnya aktivitas masyarakat perkotaan telah mendorong mereka untuk melakukan pengeluaran yang lebih salah satunya untuk memperoleh makanan. Terdapat 17,9% populasi rumah tangga yang tinggal di wilayah perkotaan Kota Yogyakarta tidak memasak di rumah.

Ketimpangan pengeluaran pangan paling rendah terdapat di wilayah perdesaan Kabupaten Sleman dengan nilai gini 0,25. Wilayah perdesaan Kabupaten Sleman memiliki luas lahan pertanian dan perkebunan yang cukup luas. Hal ini mendorong harga kebutuhan pangan menjadi lebih rendah untuk

wilayah ini. Eratnya adat isitiadat di daerah perdesaan menciptakan masyarakat yang lebih dekat satu sama lain sehingga berbagi bahan makanan bukanlah hal yang jarang ditemui. Sedikitnya jumlah warung makan dan mudahnya memperoleh bahan makanan menjadikan wilayah perdesaan Kabupaten Sleman sebagai wilayah dengan ketimpangan pengeluaran pangan yang paling rendah.

Ketimpangan pengeluaran non-pangan paling tinggi terdapat di wilayah perdesaan Kulon Progo dengan nilai gini 0,79. Pembangunan infrastruktur yang intensif di wilayah Kulon Progo mendorong terjadinya peningkatan tingkat konsumsi masyarakat. Adanya pembangunan di wilayah perdesaan mendorong masyarakat menjadi lebih konsumtif karena masyarakat menerima dana pembebasan lahan. Masyarakat yang tanahnya dibebaskan memperoleh insentif uang dalam jumlah yang besar sehingga mendorong masyarakat untuk membeli kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier yang dibeli berupa peralatan

elektronik dan kendaraan bermotor. Fenomena perubahan konsumsi pasca pembangunan juga mempengaruhi ketimpangan di wilayah Kulon Progo secara keseluruhan. Hal ini terlihat dengan lebih tingginya ketimpangan di wilayah perdesaan untuk setiap kategori pengeluaran.

Ketimpangan pengeluaran non-pangan paling rendah adalah perdesaan Kabupaten Sleman dengan nilai gini 0,34. Wilayah perdesaan Kabupaten Sleman menunjukkan pola ketimpangan yang rendah untuk tiap jenis kategori pengeluaran. Hal ini menggambarkan wilayah ini sebagai wilayah yang paling setara. Masyarakat di wilayah perdesaan Sleman memiliki pola konsumsi yang stabil. Masyarakat perdesaan Sleman telah dapat mengakses kebutuhan sehari-hari dengan mudah.

Ketimpangan pengeluaran total tertinggi terdapat di wilayah perkotaan Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kecenderungan ketimpangan yang paling tinggi. Hal ini cukup wajar mengingat karakteristik wilayah perkotaan yang heterogen. Banyaknya rumah kontrakan yaitu sejumlah 38,9% menandakan wilayah Kota Yogyakarta telah banyak dihuni oleh pendatang dan masyarakat kelas ekonomi menengah yang belum mampu membeli rumah sendiri. Kondisi ini tentunya meningkatkan kesenjangan dalam masyarakat.

Ketimpangan pengeluaran total paling rendah adalah perdesaan Kabupaten Sleman. Wilayah perdesaan Sleman menjadi wilayah yang ketimpangannya paling rendah untuk setiap kategori pengeluaran. Kondisi ini didukung eratnya kekeluargaan di areal perdesaan serta kondisi geografis yang mendukung. Wilayah perdesaan Sleman memiliki akses yang baik sehingga masyarakat lebih mudah mengakses

kebutuhan sehari-harinya. Keberadaan aktifitas pertanian dan perkebunan juga menunjang masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan kebutuhan pangan.

Ketimpangan pengeluaran perkapita paling tinggi terdapat di wilayah perdesaan Bantul dengan nilai gini 0,74. Wilayah perkotaan Bantul menduduki urutan kedua sebagai wilayah dengan ketimpangan pengeluaran perkapita tertinggi dengan nilai indeks 0,64. Kondisi ini menggambarkan ketimpangan perkapita yang tinggi untuk wilayah Bantul. Ketimpangan pengeluaran perkapita dapat disebabkan pola piramida penduduk tahun 2016 untuk wilayah Bantul yang mengalami kecenderungan ke arah stasioner (BPS, 2017). Kondisi ini menggambarkan jumlah penduduk usia produktif dan non-produktif yang cenderung seimbang sehingga dapat mengakibatkan ketimpangan pengeluaran perkapita yang tinggi. Perlu adanya kajian lebih mendalam untuk mengetahui penyebab ketimpangan pengeluaran perkapita khususnya untuk wilayah Kabupaten Bantul.

### **Kondisi Hunian**

Kondisi hunian menjadi penting bagi analisis ketimpangan. Kondisi hunian menjadi titik pendorong kualitas hidup keluarga. Kualitas hunian yang baik dapat mempengaruhi penghidupan keluarga. Hunian yang baik dan dilengkapi fasilitas penunjang seperti listrik, ketersediaan air dan sanitasi yang baik dapat meningkatkan taraf penghidupan keluarga. Adanya ketimpangan kualitas hunian cenderung menempatkan orang-orang miskin pada lingkungan yang kurang baik dan pada kondisi yang ekstrim dapat memunculkan *slum area* atau permukiman kumuh pada wilayah tertentu.

Ketimpangan kualitas hunian dapat dilihat dari luas bangunan rumah. Masyarakat dengan kelas ekonomi tinggi dapat membangun rumah dengan luasan yang lebih luas atau bertingkat. Disisi lain masyarakat dengan kelas ekonomi rendah mengalami kesulitan untuk memperoleh biaya dan ruang yang cukup bagi permukiman yang layak. Luas hunian menjadi variabel penting dalam ukuran kualitas hunian. Luas hunian yang sempit cenderung memaksa penghuninya menyatukan fungsi ruangan sehingga hunian menjadi tidak nyaman dan kurang higienis.

Tabel 2 Ketimpangan Luas Lantai Hunian Berdasarkan Desa Kota pada Tiap Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016

Kabupaten	klasifikasi wilayah	Indeks gini luas lantai hunian
<b>Kulonprogo</b>	Kota	0,2611
	Desa	0,2995
<b>Bantul</b>	Kota	0,8796
	Desa	0,7014
<b>Gunungkidul</b>	Kota	0,7277
	Desa	0,4978
<b>Sleman</b>	Kota	0,8949
	Desa	0,4623
<b>Kota Yogyakarta</b>	Kota	0,7853

Sumber: Survei sosial ekonomi nasional kor rumah tangga periode Maret 2016

Luas lantai hunian memperlihatkan kemampuan ekonomi pemiliknya dan kemampuan masyarakat untuk memperoleh lahan. ketimpangan luas lantai hunian terlihat pada wilayah perkotaan yang telah berkembang. Hal ini menggambarkan adanya ketimpangan luas lantai hunian lebih banyak

disebabkan oleh harga lahan pada tiap wilayah. Harga lahan yang mahal menyebabkan hanya sebagian masyarakat yang mampu memperoleh luas lahan yang lebih luas. Padatnya wilayah perkotaan menyebabkan harga lahan menjadi lebih tinggi. Nilai lahan untuk wilayah perkotaan menjadi lebih tinggi karena nilai ekonominya yang lebih tinggi dan lebih mudah diakses dari pusat aktivitas.

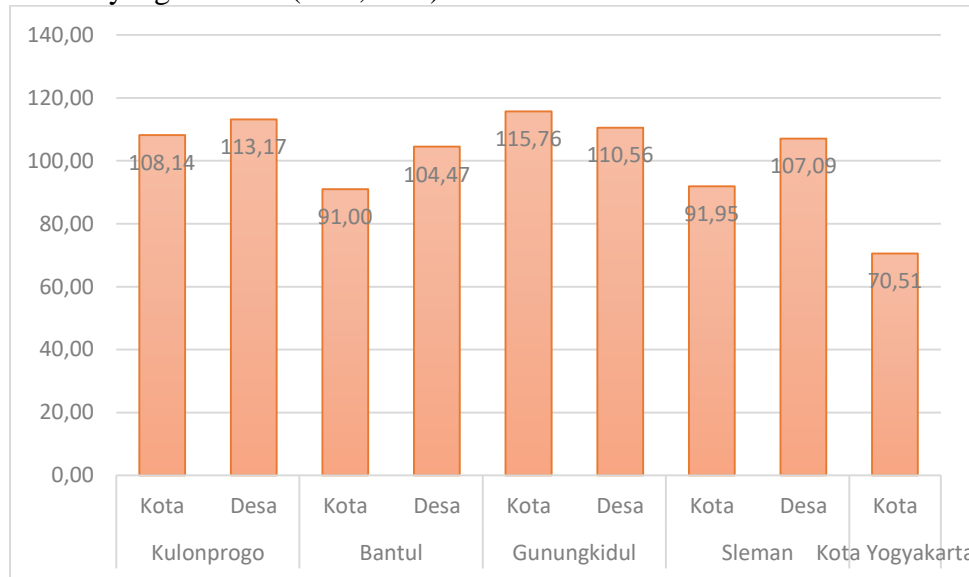
Kabupaten Kulonprogo menunjukkan ketimpangan yang paling rendah karena wilayah Kabupaten Kulonprogo memiliki luasan paling besar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo memiliki luas 1.485,36 km<sup>2</sup> atau setara dengan 46,63% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BPS,2016). Hal ini menyebabkan tekanan terhadap lahan yang lebih rendah sehingga masyarakat dapat memperoleh lahan dengan lebih mudah.

Ketimpangan untuk wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding wilayah pedesaan. Wilayah perkotaan Bantul dan Sleman yang berdekatan dengan pusat kota menjadi wilayah dengan ketimpangan paling tinggi. Proses perembetan kota menjadikan wilayah Bantul dan Sleman menjadi lebih timpang. Akses yang mudah menuju wilayah Sleman dan Bantul mendorong wilayah ini untuk lebih maju dan membuat tekanan terhadap lahan makin tinggi.

Faktor fisiografis dan kemampuan ekonomi mempengaruhi ketimpangan luasan hunian di Gunungkidul. Pembangunan rumah harus memperhatikan kondisi lahan yang berbukit. Disisi lain pembangunan permukiman untuk wilayah Gunungkidul lebih banyak terpusat di areal yang dekat dengan sumber air dan jalan. Hal ini dibuktikan dengan kepadatan penduduk yang rendah di wilayah Kabupaten

Gunungkidul yaitu 482 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2015. Kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Gunungkidul merupakan yang paling rendah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun yang sama (BPS,2016).

Tekanan penduduk terhadap lahan tergolong rendah untuk wilayah Kabupaten Gunungkidul.



Gambar Grafik Rata-rata Luas Hunian Berdasarkan Desa Kota pada Tiap Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016  
 Sumber: Survei sosial ekonomi nasional kor rumah tangga periode Maret 2016

Luas hunian rata-rata menggambarkan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap lahan. Hal ini menyangkut harga dan ketersediaan lahan disuatu wilayah. Rata-rata luas hunian tertinggi ada di wilayah Kulon Progo dan Gunungkidul. Kedua wilayah ini memiliki kecenderungan luasan yang tidak jauh berbeda untuk wilayah perkotaan dan pedesaan. Wilayah dengan rata-rata luasan hunian yang sempit ada di wilayah Kota Yogyakarta, Perkotaan Kabupaten Bantul dan Perkotaan Kabupaten Sleman. Luas hunian rata-rata dapat menggambarkan arah perkembangan perkotaan secara kasar. Kondisi ini diakibatkan oleh padatnya wilayah Kota Yogyakarta sehingga terjadi perembetan ciri fisik kekotaan menuju wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta yaitu Kabupaten Sleman dan Bantul.

Hasil perhitungan dari penjumlahan variabel kualitas permukiman menunjukkan hanya sebagian kecil hunian yang berkualitas buruk. Tidak ada perbedaan signifikan untuk wilayah perkotaan dan pedesaan. Permukiman dengan kualitas buruk lebih banyak terdapat di perkotaan walaupun perbedaannya tidak besar. Wilayah pedesaan Bantul menjadi wilayah dengan jumlah hunian kualitas rendah terbanyak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi ini juga diiringi dengan ketimpangan luas hunian yang cukup tinggi yaitu 0,70. Nilai ini lebih tinggi dibanding wilayah pedesaan di kabupaten lain. Dapat disimpulkan wilayah pedesaan Bantul memiliki kesenjangan hunian yang lebih tinggi dibanding wilayah lain.

Tabel 3 Presentase Klasifikasi Kualitas Hunian Berdasarkan Desa Kota pada Tiap Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016

Wilayah		kualitas hunian		
		Buruk	Sedang	Baik
<b>Kulonprogo</b>	Kota	4,69	30,80	61,34
	Desa	9,81	51,45	38,75
<b>Bantul</b>	Kota	0,28	35,69	64,03
	Desa	16,50	37,80	45,71
<b>Gunungkidul</b>	Kota	0,99	34,49	64,52
	Desa	7,11	64,64	32,87
<b>Sleman</b>	Kota	1,91	39,41	58,68
	Desa	5,92	54,23	39,85
<b>Kota Yogyakarta</b>	Kota	0,30	35,92	63,77

*Sumber: Survei sosial ekonomi nasional kor rumah tangga periode Maret 2017*

Setiap rumah tangga memiliki sumber daya yang berbeda beda. Sumberdaya ini terdiri dari sumberdaya manusia dan aset yang dimiliki. Pengeluaran tidak hanya menjadi tolak ukur utama untuk menggambarkan ketimpangan ekonomi. perbedaan kepemilikan sumberdaya diperlukan bagi suatu keluarga untuk bertahan terhadap guncangan. Guncangan yang dimaksud adalah kejadian tidak disangka yang membuat keluarga menderita kerugian misalnya berupa bencana alam dan kecelakaan. Keluarga yang rentan terhadap guncangan dikategorikan dengan kepemilikan aset berupa hunian yang layak.

Perbandingan kualitas hunian dan kelompok pengeluaran diperlukan untuk menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat. masyarakat dengan kualitas hunian rendah memiliki penghasilan kurang dari empat juta rupiah. Hal ini belum ditambah jumlah tanggungan dalam keluarga tersebut. Masyarakat pada kategori ini lebih rentan terhadap guncangan dan perlu mendapat perhatian khusus.

Variasi kualitas hunian yang beragam banyak ditemukan pada wilayah

perdesaan. kondisi ini berbebeda dengan ketimpangan pengeluaran yang cenderung tinggi di wilayah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi tidak selalu mengarah kepada tingkat ketimpangan hunian. Penyediaan layanan dan fasilitas di perkotaan mengakibatkan kualitas hunian yang lebih baik pada wilayah perkotaan. Wilayah perdesaan dengan ketersediaan lahan yang luas justru cenderung menunjukkan adanya ketimpangan kualitas hunian karena variasi kualitas hunian yang beragam. Hal ini disebabkan oleh perpindahan masyarakat dengan kelas ekonomi yang lebih tinggi yang cenderung menjauh dari pusat kota. Faktor lain yang mempengaruhi adalah budaya dan keberadaan hunian yang masih bersifat tradisional pada wilayah tertentu.

Variasi kualitas hunian yang beragam nampak pada perdesaan Kabupaten Bantul. Perdesaan Kabupaten Bantul juga menempati presentase tertinggi untuk klasifikasi kualitas rumah yang buruk yaitu 16,5%. Kondisi ini tidak linier dengan ketimpangan ekonomi 0,35 yang dikategorikan rendah (kurniasih, 2013). Kondisi kualitas



hunian yang baik banyak terdapat di wilayah perkotaan. Sebagian besar wilayah perkotaan memiliki presentase kualitas hunian yang baik sekitar 60%. Jumlah ini menggambarkan sebagian besar masyarakat telah mampu mendapatkan kualitas hunian yang layak. Wilayah perkotaan sebagai wilayah dengan ketimpangan yang lebih tinggi dibanding perdesaan justru memiliki variasi kualitas hunian yang lebih

seragam. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh apa perbandingan kualitas hunian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 4 Klasifikasi Kualitas Hunian Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Wilayah Pedesaan Kabupaten Bantul 2016

Kabupaten	klasifikasi wilayah	pengeluaran total	kualitas hunian		
			Buruk	Sedang	Baik
<b>Kulonprogo</b>	Kota	0,40	4,69	30,80	61,34
	Desa	0,57	9,81	51,45	38,75
<b>Bantul</b>	Kota	0,53	0,28	35,69	64,03
	Desa	0,35	16,50	37,80	45,71
<b>Gunungkidul</b>	Kota	0,52	0,99	34,49	64,52
	Desa	0,38	7,11	64,64	32,87
<b>Sleman</b>	Kota	0,56	1,91	39,41	58,68
	Desa	0,27	5,92	54,23	39,85
<b>Kota Yogyakarta</b>	Kota	0,61	0,30	35,92	63,77

*Sumber: Data Olahan Survei sosial ekonomi nasional kor rumah tangga periode Maret 2016*

## KESIMPULAN

1. Hasil perhitungan indeks gini memperlihatkan:
  - a) Ketimpangan ekonomi berdasarkan pengeluaran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung sedang.
  - b) klasifikasi ketimpangan pengeluaran yang paling tinggi terdapat di Kota Yogyakarta
  - c) Wilayah Pedesaan Kabupaten Sleman adalah wilayah dengan ketimpangan paling rendah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  - d) Wilayah perkotaan lebih timpang dibanding wilayah pedesaan

2. Ketimpangan kualitas hunian yang ditunjukkan dengan variasi kualitas hunian tidak menunjukkan pola yang sama dengan hasil perhitungan ketimpangan ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa ketimpangan ekonomi tidak selalu mengakibatkan ketimpangan kualitas hunian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1992). Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman. Arsip Nasional.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Daerah Istimewa Yogyakarta dalam angka 2016. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.

- Badan Pusat Statistik. (2017). Kabupaten Sleman dalam angka 2016. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Kabupaten Gunungkidul dalam angka 2016. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Kabupaten Kulon Progo dalam angka 2016. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Kabupaten Bantul dalam angka 2016. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik. (2016). Analisis Informasi Statistik Pembangunan Daerah istimewa Yogyakarta 2016. Yogyakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Damawati, Fima. (2011). Kajian Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Kualitas Permukiman Di Daerah Kota dan Desa: Kasus di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dan Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul. *Skripsi*. Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Giyarsih, Sri Rum. (2010). Urban Sprawl of The City of Yogyakarta Special Reference to The Stage of Spatial Transformation. *Indonesian Journal of Geography* volume 42, No 1, June 2010 : 47-58.
- Jargowsky, Paul A. (2001). *Sprawl, Concentration of Poverty, and Urban Inequality*. Washington, DC: Urban Institute.
- Lenyanti, Lutfi. (2004). Fenomena Merambahnya Perumahan Real Estat Di Pinggiran Kota Yogyakarta. *Pattra Gadjah Mada* vol.1 no.1 Desember 2004:53-54
- Labolatorium Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Padjajaran dan BAPPEDA Kota Bandung, 2015. *Laporan Akhir Penyusunan Indeks Gini Ratio Kota Bandung*. Bandung: Labolatorium Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Padjajaran dan BAPPEDA Kota Bandung.
- UN-Habitat. (2012). *Sustainable Housing For Sustainable Cities: A Policy Framework For Developing Countries*. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme
- World Bank.(2016). *Indonesia Rising Divide*. Jakarta: World Bank.
- Yunus, Hadi Sabari. (2008). *Dinamika Wilayah Peri-urban Determinan Masa Depan Kota*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.